



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

| No | Nama Penelitian Dan Universitas | Judul Penelitian | Tujuan penelitian | Metode | Kesimpulan |
|----|---|--|---|---|--|
| 1 | Slamet Handi – Hartandi Universitas Indonesia | Framing Peristiwa Bom Madrid dalam Pemberitaan Majalah Focus dan Der Spiegel | Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep <i>frame</i> yang mana berusaha diciptakan oleh majalah <i>Focus</i> dan <i>der Spiegel</i> berkaitan dengan pelaku pemboman Madrid. Selain itu Handi ingin mengetahui cara-cara atau strategi-strategi apa saja yang digunakan keduanya dalam menciptakan konsep <i>frame</i> . | Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki | 1. Majalah Focus, lebih banyak menggunakan gambar-gambar berwarna, kutipan-kutipan, artikel yang lebih pendek dan bahasa yang sederhana. Dalam hal ini majalah Focus lebih menciptakan konsep <i>frame</i> yang menuduh al-Qaida sebagai dalang peledakan bom dengan cara melalui pengutipan narasumber yang mendukung konsep <i>frame</i> majalah Focus. Majalah Focus juga menggunakan berbagai terminology atau strategi politik penamaan yang ditempelkan pada al-Qaida. Kata-kata seperti <i>Islamisten</i> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | 2. Majalah der Spiegel tidak banyak menguraikan fakta-fakta dalam pemberitaannya. Konsep framing yang diciptakan pada majalah de Spiegel, dimana majalah ini menuduh kelompok islam fundamentalis dengan cakupan pemberitaan yang luas |
| 2 | Handry Satriatama – Universitas Indonesia | Konstruksi Realitas oleh Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa 11 September oleh Majalah TIME US Edisi Khusus) | <p>a. Untuk memberikan realitas gambaran yang dikonstruksikan oleh majalah TIME melalui pemberitaan tentang serangan terhadap Menara kembar WTC, New York, Amerika Serikat tanggal 11 September 2001.</p> <p>b. Untuk mengungkap makna-makna implisit yang terdapat dalam pemberitaan majalah TIME tentang serangan terhadap Menara kembar WTC, New York, Amerika Serikat</p> | Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dan model William Gamson | <p>1. Kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni patriotisme dan religiusitas, karena pada edisi khusus pada majalah TIME dengan bias-bias ideology bangsa Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa media massa, bahkan majalah sekelas TIME sekalipun, tidak dapat menanggalkan kode-kode ideology (patriotisme dan religiusitas) dalam mengkonstruksi realitas melalui pemberitaan.</p> <p>2. Realitas bahwa peristiwa 11 September merupakan sebuah tragedy yang telah memicu sikap kepahlawanan dan semangat nasionalisme</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | | <p>tanggal 11 September</p> <p>c. Menemukan makna-makna tersembunyi yang di marjinalkan oleh teks dalam kaitannya dengan konstruksi realitas yang diciptakan oleh majalah TIME terhadap peristiwa 11 September dalam edisi khusus 11 September 2001</p> | | <p>bangsa Amerika dapat dianggap sebagai keberpihakan majalah TIME terhadap ideology patriotism dan ketuhanan bangsa Amerika</p> |
| 3 | Diane Pitaloka – Universitas Multimedia Nusantara | Konstruksi Pemberitaan Terorisme di Harian Suara Pembaharuan dan Republika pada Kasus Bom Cirebon dan Solo | Tujuan penelitian untuk mengetahui konstruksi isu terorisme dalam pemberitaan kasus bom bunuh diri di masjid Mapolresta, Cirebon dan gereja bethel injil sepenuh kepunton, solo pada republika dan suara pembaruan | Analisis framing model Zhondang Pan Gerald M.Kosicki | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Pembaharuan menekankan sisi agama yang dapat dilihat dari elemen sintaksis, dimana terdapat pernyataan sumber yang bertindak sebagai pengamat terorisme dan militer menghubungkan Islam dengan permasalahan teror bom Cirebon dan Solo 2. Republika menekankan sisi politik. Hal ini dapat terlihat pada banyaknya pernyataan sumber yang berhubungan dengan kinerja SBY dalam menyikapi kasus teror |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | <p>bom Cirebon dan Solo. Ditambah lagi dengan pernyataan sumber lain pada elemen sintaksis, yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra Presiden secara tidak langsung.</p> <p>3. Suara Pembaruan dan Republika tidak bersikap netral dalam pemberitaannya. Keduanya tidak ragu untuk menunjukkan dan menonjolkan makna yang sebenarnya ingin ditonjolkan</p> |
| 4 | Prita Dian Wardhani – Universitas Pelita Harapan | Analisis Framing Berita Ledakan Bom di Hotel J.W Marriot pada harian Republika dan Suara Pembaharuan Terbitan 5-18 Agustus 2003 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana Harian Republika mengonstruksi berita ledakan bom di J.W. Marriot 2. Untuk mengetahui bagaimana Suara Pembaharuan mengonstruksi berita ledakan bom di J.W. Marriot 3. Untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan ledkana bom di Hotel J.W Marriot pada Harian | Analisis framing model Robert M Entman | <ol style="list-style-type: none"> 1. Harian Republika memandang kasus Marriot sebagai masalah agama dan politik. Dalam setiap artikelnnya, unsur pemberitaan terhadap agama islam terlihat begitu menonjol, salah satunya dapat dilihat dari narasumber yang sebagian besar datang dari golongan islam. Pihak asing (terutama Amerika Serikat) dianggap sebagai ‘aktor penyebab penurunan citra islam |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|
| | | | Republika dan Suara Pembaharuan | hingga identic dengan terorisme 2. Suara Pembaharuan melihat kasus Mariiot sebagai masalah politik dan kemanan Karena terjadi di tengah Sidang Tahunan MPR dan menjelang pemilu 2004. Sedangkan agama dijadikan 'simbolik' perlawanan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan 3. Perbedaan kecenderungan pmeberitaan tersebut tentunya tidak lepas dari ideology dan kebijakan yang dianut oleh masing-masing instuisu media yang tentunya dipengaruhi oleh visi misu dan tujuan yang ingin dicapai |
|--|--|--|------------------------------------|---|

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Slamet Handi dengan isu peristiwa bom Madrid dalam pemberitaan majalah Focus dan der Spiegel, bermula dengan kejadian pengeboman yang terjadi di Madrid, Spanyol pada tanggal 11 Maret 2004. Alasan Slamet memilih majalah Focus dan der Spiegel, karena kedua majalah tersebut merupakan majalah berita nasional dengan oplah tertinggi di Jerman. Berdasarkan dari www.spiegelgruppe.de, 20 Maret 2006 jumlah pembaca majalah Focus mencapai 9.3%

dari total penduduk Jerman. Sedangkan jumlah pembaca dari majalah der Spiegel sekitar 9,1% dari total penduduk Jerman.

Dari hasil penelitian Slamet, majalah Focus, lebih banyak menggunakan gambar-gambar berwarna, kutipan-kutipan, artikel yang lebih pendek dan bahasa yang sederhana. Dalam hal ini majalah Focus lebih menciptakan konsep frame yang menuduh al-Qaida sebagai dalang peledakan bom dengan cara melalui pengutipan narasumber yang mendukung konsep frame Majalah Focus. Majalah Focus juga menggunakan terminologi atau strategi politik penman yang ditempelkan pada al-Qaida. Kata-katanya seperti, *Islamisten, die Glaubigen, Islamisch, Muslim*. Hal ini terjadi karena kelompok al-Qaida merupakan organisasi yang selalu membawa doktrin keislaman dan kearaban. Sebab itu, kata-kata tersebut menjadikan citra negara Islam lekat dengan kekerasan di mata masyarakat barat. Majalah der Spiegel tidak banyak menguraikan fakta-fakta dalam pemberitaannya. Isu terorisme sangatlah populer pada masa sekarang. Hampir tidak ada hari yang dilewatkan tanpa pemberitaan mengenai terorisme di kebanyakan media massa dunia. Kedua, dijadikannya al-Qaida sebagai salah satu tersangka. Peristiwa tersebut terjadi pada saat polarisasi antara masyarakat Islam dan masyarakat Barat mulai berakar kuat dalam pikiran orang-orang Barat dan media massa Barat.

Konsep framing yang diciptakan pada majalah de Spiegel, dimana majalah ini menuduh kelompok islam fundamentalis dengan cakupan pemberitaan yang luas. Dengan cara mengungkapkan berbagai fakta mengenai kondisi Eta yang sudah melemah dan tidak mungkin melakukan pemboman Madrid. Majalah de Spiegel melakukan

pemberitaannya cenderung terselubung dalam menuduh al-Qaida, karena identitas de Spiegel merupakan majalah sumber informasi bagi jurnalis sebagai rujukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau der Spiegel mengatakan dirinya sebagai sumber informasi untuk para jurnalis Jerman.

Pada penelitian kedua, penelitian ini dilakukan oleh Handry dengan isu peristiwa 11 September 2001 oleh majalah Time U.S. Kejadian 11 september 2011 merupakan sebuah tragedi yang memicu sikap kepahlawanan dan semangat nasionalisme bangsa Amerika. Penelitian ini menggunakan pisau analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dan model William Gamson. Meliputi penonjolan makna, penguatan kesan dan penggunaan struktur fakta yang dianggap sebagai perangkat simbolik ketiga teks Majalah TIME edisi 11 September 2001. Penelitian ini dilakukan guna mengenang sebuah tragedi yang memicu sikap kepahlawanan dan semangat nasionalisme bangsa Amerika. Alasan Handry memilih majalah TIME U.S edisi Khusus, karena majalah TIME U.S sebagai salah satu majalah berskala internasional yang cukup menonjol di Amerika Serikat dan dunia. Majalah TIME U.S juga memiliki jaringan sirkulasi berskala internasional. Konstruksi penelitian ini diperoleh melalui interpretasi peneliti dengan metode analisis framing Berdasarkan dari www.worldencyclopedia.com majalah TIME U.S pada tahun 2005 menempati ranking pertama di dunia dalam hal sirkulasi untuk kategori majalah berita.

Selanjutnya pada penelitian ketiga, Diane Pitaloka dengan judul Konstruksi Pemberitaan Terorisme di Harian Suara Pembaharuan dan Republika Pada Kasus BOM Cirebon dan Solo". Dengan tujuan untuk mengetahui konstruksi isu terorisme dalam

pemberitaan kasus bom bunuh diri di Masjid Malporesta, Cirebon dan Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Solo pada Republika dan Suara Pembaharuan. Penelitian ini menggunakan tipe analisis isi kualitatif.

Penelitian yang dilakukan Diane menggunakan pisau analisis analisis *framing* model Zhondang Pan Gerald M.Kosicki. Berdasarkan analisis framing yang dilakukan, diketahui Suara Pembaharuan dan Republika kesamaan dalam penekanan sisi hukum, dimana kedua media ini menjelaskan identitas pelaku dan kronologis peristiwa. Mulai dari latar belakang pelaku, jaringan, motif sampai dengan pernyataan sumber yang digunakan membahas masalah hukum juga memiliki kesamaan. Namun sisi lain penelitian ini juga menemukan perbedaan yang dimiliki Suara Pembaharuan dan Republika dalam penonjolan berita. Suara Pembaharuan dalam hal ini menekankan berita agama yang dapat dilihat dari elemen sintaksis. Republika terlihat lebih banyak menggunakan pernyataan SBY dibandingkan dengan Suara Pembaharuan. Baik Suara Pembaharuan dan Republika melakukan penonjolan berita dari elemen skrip, retorik. Pada salah satu objek media yaitu Suara Pembaharuan, tidak menulis narasumber yang diwawancarai dengan jelas, karena terlihat ada narasumber yang tidak disebutkan namanya melainkan hanya disebutkan asal narasumber. Sementara itu hendaknya Suara Pembaharuan tidak menggunakan ideologinya dalam pemberitaan.

Pada penelitian yang terakhir, Prita Dian Wardhani Analisis Framing Berita Ledakan Bom di Hotel J.W Marriot pada harian Republika dan Suara Pembaharuan. Pada penelitian ini, Prita menggunakan metode analisis *framing* model Robert M Entman. Dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan ledakan bom di

Hotel J.W Marriot pada kedua harian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kedua surat kabar dalam memandang dan mengonstruksi peristiwa yang sama. Diperoleh kesimpulan bahwa kedua media menampilkan peristiwa yang sama, yaitu pengemboman Hotel J.W Marriot dengan frame yang berbeda.

Dari hasil pengamatan penelitian sebelumnya, tujuan dalam melakukan penelitian terkait terorisme di mata media adalah penulis ingin mengetahui dan menentukan keberadaan posisi penelitian ini. Dimana pada penelitian sebelumnya, mereka menggunakan dua media dan penulis menggunakan satu media yang melakukan pemberitaan secara mendalam. Namun, ada beberapa kesamaan dari pemilihan media yang melakukan pemberitaan secara mendalam yaitu penelitian Slamet dengan majalah de Spiegel, majalah Focus dan penelitian Handry dengan majalah TIME. Dalam hal ini penulis memiliki kesamaan dengan Prita dalam metode yang digunakan yaitu *framing* model Robert M Entman. Namun, Prita hanya menggunakan satu dimensi dari model Entman yaitu penonjolan aspek.

Selain itu dalam perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu, metode penelitian yang dilakukan mereka menggunakan model *framing* Pan Kosicki dan Willian Gamson. Belum banyak penelitian mengenai terorisme menggunakan media majalah di Indonesia.

Jadi penulis menempatkan penelitian ini untuk melengkapi dan memberikan perspektif lain. Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan melihat dari penelitian terdahulu dan isu pemberitaan yang lebih aktual dengan bertema terorisme serta

melihat kekurangan dari penelitian sebelumnya. Alhasil penulis mengarahkan penelitian ini dengan tema terorisme di media Indonesia dengan majalah Tempo yang menggunakan framing model Robert M Entman menggunakan dua dimensi, yaitu seleksi isu bagian internal dan penonjolan aspek.

2.2 TEORI DAN KONSEP

2.2.1 KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL MEDIA MASSA

Pada era perkembangan teknologi dan informasi, pembentukan konstruksi realitas tidak hanya dilakukan orang ke orang. Namun dalam hal ini ada peran media massa yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Dimana isi media adalah hasil para pekerja media yang mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya (Sobur, 2009, h. 88).

Seperti yang dikatakan Sutanto yang dikutip oleh Wiryanto (2000, h. 2) *mass communication* merupakan istilah yang diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (*mass media*)

Menurut Sobur (2009, h. 88) pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*).

Menurut Peter L. Berger dan Luckman, substansi “teori konstruksi media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi

sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis. (Bungin, 2006, h. 207)

Dari konten konstruksi sosial media massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap berikut (Bungin, 2006, h. 209)

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada *desk* editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki *desk* yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan visi suatu media. Ada isu penting yang menjadi sorotan media massa setiap hari yaitu, tahta, harta, dan perempuan. Selain itu ada juga fokus yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang, yaitu persoalan-persoalan sensitivitas, sensualitas, maupun kengerian. Dalam menyiapkan materi konstruksi sosial ada tiga hal penting dalam penyiapan materi yaitu:

a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme,

Media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal. Oleh sebab itu media massa dimiliki oleh kapitalis yang menggunakan media massa sebagai penciptaan uang dan ideologinya membuat media laku di masyarakat.

b. Keberpihakan semu kepada masyarakat,

Media massa menggunakan berita-berita dan acara-acara yang berbau simpati serta kontroversi untuk menaikkan *rating* demi kepentingan kapitalis

c. Keberpihakan kepada kepentingan umum.

Hal ini merupakan visi media massa. Namun akhir-akhir ini mendengar visinya seperti itu, tetapi visi tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana semestinya.

2. Tahap Sebaran Konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real-time* dengan kata lain mengedepankan unsur kecepatan dan ketepatan. Karena sifatnya-sifatnya yang langsung (*live*), maka yang dimaksud dengan *real time* oleh media elektronik adalah seketika disiarkan. Biasanya media elektronik memiliki konsep *real time* yang berbeda dengan media cetak. Namun bagi varian-varian media cetak, yang dimaksud dengan *real time* terdiri dari beberapa konsep hari, minggu, atau bulan, seperti terbitan harian, terbitan mingguan atau terbitan beberapa mingguan atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep *real time* yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

3. Pembentukan Konstruksi Realitas

Terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap setelah pemberitaan sampai kepada pembaca dan pemirsanya; Pertama, konstruksi realitas membenaran di mana masyarakat cenderung membenarkan apa saja yang ada di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa yaitu pilihan pembaca dan pemirsa media untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa; dan ketiga, sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang secara kebiasaan tergantung pada media massa.

4. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pembaca atau pemirsa, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Sebuah berita yang disampaikan media merupakan sebuah konstruksi atas realitas. Maka dari itu seringkali berita dengan peristiwa yang sama namun dikonstruksi secara berbeda (Eriyanto, 2002, h. 17)

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti riil. Realitas adalah sebuah interaksi antara wartawan dengan fakta (Eriyanto, 2002, h. 17).

Menurut Sobur (2009, h. 88) wartawan adalah sosok yang mengkonstruksikan realitas. Karena pekerjaan wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak dengan cara menyusun fakta-fakta ke dalam sebuah bentuk laporan jurnalistik.

Bila dikaitkan ke dalam konteks media cetak Majalah Tempo. Majalah Tempo menggunakan empat tahap di atas dengan porsi yang seimbang dan mengedepankan kepentingan publik secara kritis dan berani serta terpercaya dibanding kepentingan kapitalisme.

2.2.2 KONSEP DASAR TERORISME

2.2.2.1 Definisi Terorisme

Membicarakan mengenai terorisme bukanlah hal asing dan baru bagi masyarakat di dunia. Hal ini merupakan fenomena tindak kekerasan yang terjadi di hampir penjuru dunia. Aksi teroris menjadikan perhatian publik cukup besar ketimbang isu politik atau hal lain yang krusial semisal jika ada isu besar seperti korupsi, maka isu terorisme dapat digunakan sebagai pengalih perhatian.

Makna terorisme menurut Golose yang berarti kata teror berasal dari bahasa latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa, sedangkan

terorisme berasal dari kata kerja *terrere* yang berarti membuat takut atau menakuti (Wahjuwibowo, 2015, h. 8).

Definisi mengenai terorisme bermacam-macam dan seringkali tidak cukup mewakili keberadaan teroris secara keseluruhan. Maka dari itu pendefinisian mengenai terorisme ada yang menentang maupun mendukung.

Dikutip dari buku *Terrorism Perspectives From The Behavioral and Sosial Sciences*, menyebutkan definisi tentang terorisme adalah

“The systematic use of terror, especially as a means of coercion”

Maksudnya adalah terorisme merupakan sebuah tindakan teror yang dilakukan secara sistematis, dan di dalamnya terdapat aspek kekerasan yang tidak terpisahkan (Smelser, & Mitchell, 2001, h. 14)

Di dalam buku Rex Hudson (1999, h. 12) peneliti ilmu sosial mendefinisikan aksi teroris sebagai berikut:

“Kekerasan yang dikalkulasikan, mengejutkan, dan ditunjukkan terhadap masyarakat sipil, termasuk personel keamanan dan militer yang tidak sedang bertugas. Terjadi dalam kondisi damai dan target-target simbolis lainnya yang dilakukan oleh agen-agen rahasia, untuk tujuan psikologis yaitu mempublikasikan masalah politik, agama dan mengintimidasi atau pemaksaan terhadap pemerintah atau masyarakat sipil agar menyetujui tuntutan mereka”

Schmid dan de Graff sebagaimana dikutip Nacos (2011, h 14), mengatakan bahwa sesungguhnya aksi terorisme adalah sebuah tindakan komunikasi, karena berbagai aksi terorisme yang terjadi ditunjukkan tidak lain

untuk mendapatkan akses terhadap tiga aspek utama dalam politik komunikasi, yakni hubungan antarmedia, pemerintah dan masyarakat,

Sama halnya menurut Hendropriyono (2009, h. 223), pengetahuan yang diperoleh para teroris regional ternyata identik dengan kegiatan epistemologis dari kelompok fundamentalis (politik). Hal tersebut tampak dari serangkaian aksi-aksi terorisme pemboman, yang dilakukan oleh jaringan terorisme regional al-Jamaah al-Islamiyah di Indonesia.

Dari beberapa pendefinisian mengenai pendefinisian terorisme yang menentang. Dapat disimpulkan bahwa teroris sendiri merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang untuk menebarkan teror, ketakutan, kekhawatiran dan rasa tidak aman di ruang lingkup masyarakat dengan berbagai faktor ekonomi, politik, agama, psikologis dan hukum.

Berbicara terorisme dari sudut pandang pendukung, mereka justru dianggap melakukan hal yang positif dan menjadikan seorang pahlawan bagi orang-orang tertentu. Hal ini didukung menurut Paul S Nelson, John L Scoot dan Prof Gabriel Weiman, mereka mengungkapkan (Golose, 2015, h. 77),

Dengan adanya aksi terorisme sebagai orang menganggap mereka sebagai pahlawan bukan penjahat. Karena dibalik aksi tersebut ada faktor politik dan sosial untuk menunjukkan memperjuangkan hak mereka

Aksi terorisme dapat dianggap sebagai pahlawan, karena berlandaskan Jihad fi sabilillah dimana untuk memerangi musuh dengan melakukan peperangan dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan membela nasib umat

Islam. Agar siap menyongsong kemenangan atau mati syahid, biasanya kegiatan ini banyak terjadi di negara Afghanistan. Maka sebab itu, teroris dianggap pahlawan karena mereka sedang menjalankan syariat Islam untuk mencapai kedamaian (Abbas, 2005, h. 13)

Sama halnya seperti para kelompok elite di Nikaragua menganggap kelompok *Sandinista National Liberation Front* (FSLN) sebagai kelompok teroris, sementara kebanyakan masyarakat di Nikaragua menganggap FSLN sebagai kelompok pejuang kemerdekaan. FSLN merupakan partai politik yang didirikan atas prinsip-prinsip sosialisme (Djelantik, 2010, h. 23).

Dalam perang dunia kedua, Jerman menyebut orang-orang Belanda sebagai teroris (akibat melawan Jerman), padahal citra yang berkembang berikutnya adalah orang-orang Belanda itu adalah pahlawan karena ingin mengusir Jerman dari negaranya (penjajahan). Hal tersebut didukung menurut Scmid & Creleisten (1993, h. 8). Seorang teroris terkadang menjadi pahlawan bagi beberapa masyarakat atau golongan.

Menurut Scmid dan de Graaf (1982) dikutip dari jurnal Prajarto (2004, h.38), terorisme tidak boleh hanya sekedar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan.

2.2.2.2 Faktor Penyebab Terorisme

Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik. Terorisme tumbuh dan berkembang didukung oleh situasi masyarakat yang tengah mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial dan terdapatnya jurang pemisah yang dalam antara miskin dan kaya (Djelantik, 2010, h. 4)

Bagi Marpaung dikutip dari buku Djelantik (2010, h. 7) aktivitas terorisme terselenggara karena adanya faktor-faktor yang melingkupinya, seperti adanya masalah kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan-tekanan globalisasi selain karena tidak efektifnya manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal.

Pada dasarnya faktor penyebab terorisme di setiap negara berbeda-beda. Karena masing-masing negara memiliki cara pandang dan tujuan yang ingin dicapai masing-masing. Berikut beberapa faktor yang menjadikan seseorang atau kelompok menjadi terorisme diantaranya (Djelantik, 2010, h. 22-30):

a. **PSIKOLOGIS**

Kondisi dimana seseorang yang memiliki ketidakadilan di dalam masyarakat. Sehingga membuat seseorang atau kelompok ingin merasakan menjadi orang penting atau diakui oleh sebuah kelompok. Lain sisi pendekatan psikologis muncul dari peran media dalam mempromosikan penyebaran terorisme di dalam diskusi penyebab terorisme. Dari hal tersebut mereka dapat terinspirasi untuk meniru karena terdorong pemberitaan

media. Hubbard mengungkapkan timbulnya calon-calon teroris, dimana seseorang sedang berada dalam kondisi yang tertekan dan frustrasi. Teroris ingin kemerosotan moral, akhlak, lawannya segera terlihat dan berharap hal itu dapat menambah rasa kepercayaan diri para pengikut kelompok teroris.

Teroris berusaha untuk mempublikasikan bahwa kekerasan adalah jalan yang benar. Tidak ada yang namanya 'pahlawan' tanpa melakukan kekerasan. Teroris berusaha untuk mempublikasikan bahwa kekerasan adalah jalan yang benar. Tidak ada yang namanya 'pahlawan' tanpa melakukan kekerasan

b. **POLITIK**

Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan erat satu sama lain. Apabila arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah teroris, muncul. Teroris dapat mengambil keuntungan dari 'sisi gelap' pemerintah. Karena dengan adanya tekanan-tekanan dari pemerintah pada masyarakat dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk bergabung dengan teroris melawan pemerintah.

Terorisme yang berorientasi politis melakukan tindakan politik secara perseorangan atas nama bersama dan secara kolektif berusaha membenarkan tindakannya. Perihal teroris seringkali merupakan kelompok elite yang dikepalai oleh para pemuda terpelajar dari kelas menengah atau menengah ke atas dan umumnya mahasiswa atau bahkan jebolan universitas

c. **EKONOMI**

Kondisi kemiskinan dan pengangguran dapat meningkatkan terorisme. Penelitian dari Alesina dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kondisi perekonomian yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan kudeta politik (1996, h. 189).

Ditambah menurut Collier dan Hoeffler menunjukkan bahwa variabel ekonomi sangat kuat untuk memunculkan perang saudara, sementara variabel politik justru menunjukkan kemampuan lebih rendah (Collier & Hoeffler, 2004, h. 563-595).

Dari segi pandang Marpaung, bahwa terorisme bertumbuh disaat kondisi disfungsi system sosial yaitu perekonomian nasional yang tidak sehat, pengangguran yang semakin bertambah sedangkan lapangan pekerjaan tidak bertambah, kesenjangan ekonomi antar golongan, inflasi yang tinggi, korupsi yang membudidaya dan ketergantungan pada pihak luar yang semakin besar (Djelantik, 2010, h. 7)

d. AGAMA

Salah satu penyebab terorisme ialah adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi keagamaan. Radikalisme agama yang cenderung mengedepankan kekerasan dan teror. Radikal agama ditenggarai menggunakan metode teror untuk mencapai kepentingannya. Salah satunya kelompok *Jemaah Islamiyah* (JI) merupakan kelompok jaringan terorisme di Asia Tenggara. Kelompok JI ini berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting. Menurut beberapa organisasi yang berpaham radikal, Jihad adalah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman. Orang-orang yang berbeda pemikirannya bisa dianggap musuh oleh mereka walaupun dalam satu negara sekalipun.

Menurut Luqman Hakim (2004, h. 19) *Political Islam* dan *Cultural Islam* merupakan dua istilah populer yang berkembang di dunia Islam. *Political Islam* adalah Islam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan. Sedangkan *Cultural Islam* adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari kehidupan islami melalui jalur non-politik, seperti dakwah Islam secara

damai atau pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya

e. **HUKUM**

Tidak maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan kelas atas. Hal tersebut memunculkan kelompok untuk melakukan tindak perlawanan serta protes kepada pemerintah dan penegak hukum yang tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kelas bawah serta ketidakadilan sebuah hukum. Salah satu tindakan perlawanan kelompok dengan cara melakukan aksi teror kepada pemerintah.

Teroris bertujuan menyebarkan paham radikal serta menebar rasa cemas dalam masyarakat. Situasi ini membantu teroris menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya memegang kontrol dan nantinya dapat menimbulkan konflik sosial

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa kelompok teroris di Indonesia sendiri terjadi karena berideologi yang radikal dan ekstrem, penyimpangan ajaran agama yang dianut dan kemiskinan absolut (Kristianti & Hasists, 2009 para 2-3). Sedangkan menurut Menteri Agama

Lukman Hakim, beliau menyebutkan faktor perlakuan yang tidak adil baik secara sistem hukum maupun kebijakan negara dan faktor terpengaruhi paham agama yang tidak sesuai sehingga dijadikan justifikasi untuk melakukan aksi teror (Kusuma, 2015, para 6-7).

2.2.2.3 Upaya-Upaya Penanganan Terorisme

Dalam penanganan teroris merupakan persolan yang cukup rumit karena teror dapat mengancam keamanan nasional. Dalam hal ini, Pemerintahan suatu negara biasanya melibatkan tindakan dari militer untuk melakukan pencegahan dan pengamanan negaranya. Penanganan dalam memberantas terorisme pun, memiliki banyak pandangan yang berbeda, hal ini yang menjadikan setiap negara memiliki kebijakan masing-masing.

Pandangan Ronald D Crelinsten dan Ales P Schmid terdapat dua model dasar untuk mengklasifikasikan *counter terrorism* yaitu, *Reconciliatory* dan *Suppressive*.

Dalam model *Suppressive* dibagi menjadi dua model yaitu

1. Peradilan pidana : ini merupakan cara yang sering digunakan oleh negara demokratis
2. Perang : dalam model perang militer adalah instrument utama dan hukum perang berlaku di negara barat

Sedangkan, model *Reconciliatory* lebih menunjukan dalam memfokuskan reformasi dan optimisasi cara menghilangkan masalah dari teroris dan bekerja

menurut apa yang sudah dihasilkan. Serta memfasilitasi pencegahan adanya teroris daripada harus melawan teroris. Tujuan dilakukan *counter terrorism* adalah untuk penguatan legitimasi (kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan) pada masyarakat (Crelinsten & Scmid, 1993, h. 309)

Menurut Irjen. Pol. Drs. Arsyad Mbai kebijakan di berbagai negara dalam memberi solusi terhadap terorisme berbeda-beda, seperti halnya pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang serta sejumlah negara lain menganggap semua terorisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya seperti halnya dengan tindakan kriminal. Amerika Serikat dan Australia misalnya bertekad untuk menggunakan semua daya guna mencegah, menghambat, mengalahkan, serta membalas semua serangan teroris, baik di dalam negeri, dan di perairan Internasional maupun di negara asing (Wuryandari, 2014, h. 78)

Salah satu upaya kerja sama Internasional dalam menghadapi terorisme Internasional adalah melalui ekstradisi. Ekstradisi adalah sebuah proses formal dimana seorang tersangka kriminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau tersangka sudah disidang dan ditemukan bersalah dan menjalani hukumannya. Idealnya semua negara, dapat mendefinisikan dan mengenali tindak terorisme supaya gampang diekstradisi ke negara yang ingin mengadili mereka. Akan tetapi, karena sampai saat ini belum dapat dibedakan antara pejuang kemerdekaan dengan teroris,

maka terdapat cara pandang mengenai pemberian suaka politik tersebut (Djelantik, 2010, h. 251)

Beda halnya menurut pandangan Dr Petrus Reinhard Golose dalam bukunya *Deradikalisme Terorisme mengenai counter terrorism*, baginnya dalam penanaman terorisme global dengan cara Deradikalisasi dan Deideologisasi. Deradikalisasi merupakan formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorime yang memiliki ikatan dengan Deidologisme. Deradikalisme merupakan program berupaya menetralsirirkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan social budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal (Golose, 2015, h. 82)

Menurut Prajarto, pemerintah secara tegas menyatakan diri tidak akan melakukan kompromi terhadap aksi kekerasan, hubungan Pemerintah dan institusi media perlu diperjelas dengan menyatakan hal-hal berikut: (Prajarto, 2004, h. 50)

1. Pemerintah membutuhkan kerja sama media untuk menangani kasus terorisme.
2. Level kontak antara pemerintah dan institusi media bisa dibatasi hanya pada level editor.
3. Reportase media terhadap kasus terorisme harus dievaluasi efeknya dan respon dalam pelayanan media dinyatakan sebagai bagian integral dari manajemen kasus

2.2.2.4 Terorisme Di Indonesia

Berbicara tentang mengenai terorisme di Indonesia menjadi berkembang lebih pesat setelah kejadian peristiwa 11 September 2001. Kelompok teroris yang pernah aktif beroperasi di Indonesia secara umum bagian dari Jamaah Islamiyah. Hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya kelompok teroris adalah Perang Irak dan Afghanistan. Kelompok-kelompok ini mempunyai satu sisi ideologi yang sama yaitu *Jihad Qital*

Pola rekrutmen sel Jamaah Islamiyah dilakukan melalui berdakwah di masjid dan pondok pesantren. Peserta pengajian yang menunjukkan minatnya dengan menyangkut kewajiban jihad kaum muslim, akan di jemput untuk diajak menghadiri *halaqah* yaitu pengajian tertutup dalam kumpulan kecil. Dalam *halaqah*, anggota baru akan dibimbing oleh seorang *murrabi* (instruktur) untuk melalui empat tahap, Pertama *tabligh* berupa penyampaian dakwah dan informasi. Kedua, *ta'lim* yaitu pengajaran intensif agama Islam. Ketiga *tarbiyah*, berupa pendidikan dan latihan mental serta *tamhiz* (penyaringan). Pada tahap terakhir para peserta akan disaring dan diuji bakt serta kemampuannya. Lalu akan dibaiaat menjadi pengikut Ji (Tim Aji, 2011, h. 158)

Dalam struktur Ji, terdapat tiga jenis lascar. Pertama, lascar biasa yang anggota pernah ikut latihan militer. Kedua, *lascar khos*, yaitu satuan khusus yang memiliki kemampuan perang dan senjata. Ketiga, *lascar istimewa*, yang

dianggap paling militant karena siap melakukan bom bunuh diri (*amaliyah istihadiyah*) (Tim Aji, 2011, h. 159)

| Kelompok Noordin M Top | Kelompok teroris Poso | Kelompok Jamaah As Sunnah, |
|---|---|--|
| <p>Kelompok ini memandang kaum kafir asli jauh (yaitu AS dan sekutunya) sebagai musuh utama. Tujuan perjuangan kelompok teroris Noordin M Top adalah untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indoensia. Untuk mencapai tujuan perjuangan, digunakanlah strategi perjuangan <i>nikayah</i> (balas dendam).</p> <p>Kelompok teroris ini telah melakukan tiga aksi pengeboman. <i>Pertama</i> megebom hotel JW Marriot di Jakarta pada 5 Agustus 2003. <i>Kedua</i> pengeboman terhadap Kedubes Australia pada 9 September 2004. <i>Ketiga</i> Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 sasarannya dua lokasi yakni Raja's Café dan Café Nyoman di Jimbaran. Kelompok ini mulai melemah akibat penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh polisi.</p> | <p>Kelompok ini muncul akibat latarbelakang konflik komunal antara warga muslim dan warga Kristen Poso yang terjadi pada 2000. Kelompok teroris Poso terkait erat dengan <i>Jamaah Islamiyah</i> (JI). Keterkaitan keduanya dimulai ketika mereka menjalin kerja sama pelatihan militer pada Agustus 2000.</p> <p>Ideologi dan tujuan perjuangan kelompok banyak mengadopsi ideologi dan tujuan perjuangan JI, yaitu berideologikan <i>jihad qital</i> dan bertujuan menegakan agama Islam. Hanya saja kelompok ini tidak menargetkan kafir jauh seperti AS sebagai musuh utamanya, melainkan kafir asli yang dekat dengan mereka (warga Kristen lokal) dan penguasa murtad atau <i>thought</i> (dalam hal ini polisi dan pejabat lokal).</p> <p>Kelompok Poso berada di bawah kendali JI pada 2002, yang dipimpin oleh Slamet Raharjo alias Hasanudin. Kelompok Poso menggunakan metode <i>clandestine</i>. Metode ini dilaksanakan dengan cara membagi kelompok ke dalam sel-sel kecil yang</p> | <p>Merupakan kelompok Islam radikal yang dalam teori Ehud Spriznak sedang memasuki periode tahap kedua. Kelompok ini berbasis di Masjid As-Sunnah di Bandung dan mulai aktif pada 2000 ketika konflik Ambon sedang bergolak. Kelompok ini tidak banyak terekspos karena cara operasi mereka yang <i>clandestine</i>. JA dipimpin oleh seorang <i>Amir jihad</i> yang sekaligus imam Masjid As-sunnah. JA menganut paham <i>salafiyah</i> yang menekankan ajaran <i>tauhid dan jihad</i>.</p> <p>Beberapa hal yang dipegang sangat teguh oleh JA adalah bahwa demokrasi adalah sesuatu agama kafir yang tidak boleh diikuti. Kelompok ini mulai mengadopsi ideologi kelompok Noordin M Top yang disebarkan Abu Fida. Dari segi metode, kelompok ini memakai taktik pembunuhan. JA melakukan upaya pembunuhan sebanyak dua kali, terhadap mantan wakil Ketua MPR Matori Abdul Jalil (2000) dan seorang warga negara Amerika Serikat John Howard karena diduga sebagai seorang agen CIA yang bertugas di Bandung. Mengenai musuh Islam yang paling utama, JA mendefinisikan sebagai pemerintah yang menolak syariat Islam yang secara</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>terdiri dari tiga sampai lima orang untuk setiap unit operasi. Sampai 2007 kelompok ini setidaknya melakukan empat belas aksi pengeboman dan pembunuhan. Kelompok Poso melemah ketika sebagian anggotanya ditangkap polisi dan menyerahkan diri. Polisi juga berhasil membunuh Ustadz Rian, menangkap Hasanudin dan menangkap anggotanya.</p> | <p>geografis tinggal dekat dengan JA (misalnya, pemerintah Indonesia), bukan musuh yang tinggal jauh (misalnya, Amerika). Mereka tidak setuju menyerang musuh yang lebih jauh karena menyibukan diri memerangi musuh yang jauh menyebabkan musuh terdekat mencuri kesempatan menyerang kaum Muslimin. Untuk mencapai tujuan, JA menggunakan strategi <i>dakwah wal jihad</i>. Dakwah dilakukan untuk memberikan <i>tarbiyah</i> (pendidikan) tentang perlunya menegakan syariat islam kepada calon-calon anggota JA dan anggota yang sudah ada.</p> |
|--|--|---|

Tabel 2.2 Kelompok Teroris di Indonesia

(Djelantik, 2010, h. 76-90).

Dalam sebuah kelompok sebelum melakukan aksi teror, mereka terlebih dahulu menggunakan strategi untuk memperlancar aksinya. Di Indonesia, kelompok teroris memiliki dual model dalam menentukan strategi, yakni model tradisional dan modern.

Terorisme model tradisional dapat dijumpai pada peristiwa bom Bali I dan II, serta bom J.W Marriot I dan II. Terorisme model tradisional sendiri adalah adanya kelompok teroris dengan personel dan komando yang jelas. Operasi serangan dilakukan secara konservatif dan berdasarkan system piramida-hierarkis (actor teroris terlibat secara penuh, mulai dari perencanaan hingga *plotting* target), sementara kelompok atau organisasinya yang

melakukan serangan mengklaim atau mengakui perbuatannya. Perubahan dari pola tradisional ke pola modern terjadi pasca Bom Bali I dan II, yakni setelah beberapa nama aktor teroris dan jaringan terorisme global terkuak. (Bakti, 2016, h. 35)

Sedangkan, terorisme model modern adalah struktur organisasi kelompok ini terpisah dan tidak jelas. Kendali komando juga tidak lagi piramid-hierarkis, melainkan bersifat mendatar. Pola ini terlihat pada kasus bom Cirebon, bom Serpong dan bom Solo. Ciri khas terorisme di masa kini yaitu fenomena

a) *Phantom Cell Network* (jaringan sel hantu)

Kelompok ini menjalankan berbagai aksi terornya tanpa memiliki ikatan kelompok, satu-satunya ikatan yang menyatukan mereka adalah kesamaan ideologi (kekerasan)

b) *Leaderless Resistance* (perlawanan tanpa pimpinan)

Mengambil pimpinan (spiritual) hanya untuk dijadikan sebagai motivator untuk sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk menjadi martir pelaku bom bunuh diri, mereka biasanya menyebut dengan nama 'pengantin'.

c) *Lone Wolf* (serigala tunggal).

Aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan serta mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri. Aksi-aksi terorisme yang melibatkan jaringan serigala tunggal biasanya

hanya berskala kecil dan tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian.

2.2.3 MEDIA DAN TERORISME

2.2.3.1 Penggunaan Media Dalam Kegiatan Terorisme

Pasca kehadiran internet dan pemakaian secara luas secara mendunia. Dalam era pemanfaatan internet peranan media massa konvensional mulai terkikis dengan maraknya internet dan jejaring sosial. Dengan adanya internet sebagai salah satu alat komunikasi memudahkan teroris untuk mengatur rencana, memberikan arahan, mengontrol maupun interaksi dengan anggota kelompok (Golose, 2015, h, 79)

Kesadaran media merupakan alat propaganda bagi kelompok teroris telah dimulai sejak lama. Media online telah menjadi arena baru bagi kelompok teroris untuk melakukan aksi terorisme. Publisitas yang mereka bangun, serta propaganda yang mereka sebar di dunia maya telah menjadikan kelompok teroris sebagai ancaman nyata bagi masyarakat dunia (Bakti, 2016, h. 69)

Media adalah aktor kuat dalam dinamika oposisi terorisme. Menurut Weimann (2004), perhatian teroris pada sebuah televisi, koran, radio, sudah tidak intens karena banyak kelompok teroris yang memiliki website pribadi yang lebih efektif dan mudah (bisa berpindah) (Ross, 2007, h. 43)

Media internet cukup membantu para terorisme dalam melakukan komunikasi secara tidak langsung. Hal ini terbukti dalam kutipan di majalah Tempo, menurut saksi yang ditangkap oleh polisi terkait peristiwa bom Sarinah.

Mereka menuturkan bahwa perencanaan ‘konser’ mendapat arahan dari Bahrn Naim melalui internet perihal rencana teror atau ‘konser’ di Jakarta. Perencanaan tersebut dimulai dari pembentukan tim lapangan, penentuan target operasi, jenis operasi (diperbolehkan menyerang, menculik, atau membunuh), dan identifikasi target (Anton & Paskalis, 2016, h. 35)

Kelompok radikal cukup memanfaatkan jaringan media sosial, karena mereka menganggap media sosial yang cukup masif digunakan untuk menopang ideology mereka yang sedang dikerjakan. Salah satunya adalah menyebar propaganda melalui *blog*. Alasannya media sosial khususnya *blog* didasari pertimbangan *segmented*, dimana para *blogger* memiliki jaringan dan komunitas tersendiri secara luas, baik didalam maupun luar negeri (Bakti, 2016, h. 104)

Majalah Tempo memaparkan bahwa jejak Bahrn Naim sejatinya sudah terendus sejak November tahun 2015. Dari blog yang dikelolanya dari Suriah, dia mengatakan bahwa sangat terinspirasi oleh serangan terorisme di Paris pada akhir November 2015. Bahrn mengaku sudah menyiapkan aksi ini bersama para pendukung ISIS di Tanah Air, dalam korespondensi dengan wartawan asing. (Sunudyantoro, Silalahi, Primandari, Azis & Rafiq., 2016, h. 37)

Campos dan Gassebner (2013), memaparkan tujuan utama terorisme adalah untuk memaksimalkan eksposur media. Sehingga mereka (teroris) dapat membuat suasana ketakutan. Perhatian publik sebagai tujuan dasar untuk

mengendalikan kegiatan teroris, sementara itu media berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan teroris (Jetter, 2014, h. 4)

Sama halnya seperti Paletz dan Scmid (1992) menyebutkan bahwa teroris memiliki tujuan untuk menyebarkan paham radikal serta menebar rasa cemas dalam masyarakat. Situasi ini membantu teroris menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya memegang kontrol dan nantinya dapat menimbulkan konflik sosial (Ross, 2007, h. 216)

Kelompok teroris dengan kesadaran tinggi menggunakan strategi media disaat sedang melakukan pemberitaan. Tebukti, bahwa teroris mampu memilih waktu yang paling tepat agar aktivitas mereka tersiarkan secara luas. Menit-menit menjelang *breaking news* dan sasaran dengan *media exposure* tinggi seolah masuk dalam perhitungan cermat kelompok teroris. Menurut Rusciano (2003) manajemen opini publik tergarap dengan baik oleh kelompok teroris. Sehingga beberapa belahan opini sebagian besar mengarah pada kecaman terhadap tindak kejam aksi terorisme atas dasar *moral judgements* (Prajarto, 2004, h. 46).

Senada juga menurut Agus Surya Bakti (2016, h, 40), kelompok teroris sengaja melakukan aksi-aksi-aksi terorismenya pada waktu *prime-time* saja. Dengan tujuan untuk menarik atensi media yang pastinya akan memproduksi berita. Dilihat dari kasus peristiwa bom Sarinah, aksi tersebut terjadi satu jam sebelum jadwal berita siang tayang.

Menurut Prajarto (2004, h. 46) kejadian aksi teroris ini bersifat *counter productive* terhadap upaya pencarian publisitas dan dukungan. Celaan sejumlah pemimpin negara dan penunjukan simpati pada korban akibat aksi teror, menandakan tidak adilnya dukungan terhadap aksi kelompok teroris. Di sisi lain, kelompok teroris mampu menggiring opini publik untuk cenderung membenarkan aksi mereka. ‘Yang dilakukan adalah untuk membungkam arogansi Amerika Serikat’. Opini publik minoritas bisa menyetujui tindakan teroris dan memberi penegasan tersendiri bila sebelumnya kelompok minoritas ini memiliki rasa tak puas pada Amerika Serikat.

Dikutip dari buku Agus Surya Bakti, *Deradikalisme Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme*, mengatakan bahwa mereka (teroris) harus melawan arogansi Amerika dengan cara melakukan perang. (Bakti, 2016, h. 38)

“Kita sedang dalam peperangan dan separuh lebih dari peperangan itu terjadi di media. Kita sedang dalam peperangan media demi merebut hati dan pikiran umat kita”

Tulisan itu terjadi pada tahun 2005 kepada pimpinan Al-Qaeda di Irak (AQI) dan Abu Musab al-Zarqawi. Seruan tersebut akhirnya menyebar luas dan menjadi semacam perintah kepada seluruh jaringan terorisme di berbagai belahan dunia untuk beralih ke perang media, bukan untuk melakukan penghancuran fisik, tetapi untuk merebut hati dan pikiran umat.

Media mulai digunakan oleh jaringan kelompok teroris untuk menggandakan efek serangan brutal yang mereka lakukan. Melalui peran

media, teroris dapat mendandani ulang tampilan serangan yang mereka lakukan agar tampak lebih menakutkan dan menebar teror secara lebih besar (Bakti, 2016, h. 39). Terlihat bahwa aksi teror di kawasan Thamrin meniru cara seperti aksi teror dan pengeboman di Paris November 2015.

Menurut Frey dan Luechinger (2003), teroris menunjukkan aksi kekerasan karena sedang mencari publisitas dan supaya mereka dikenal secara luas (Jetter, 2014, h. 3)

Terlihat dalam aksi bom bunuh diri dan aksi brutal yang terjadi di kawasan M.H Thamrin. Diketahui, bom bunuh diri dianggap dapat menjamin menjadi sorotan utama para media dan pemerintah. Hoffman (2003) membenarkan bom bunuh diri mendapat perhatian media secara lebih signifikan daripada non-bunuh diri. Oleh sebab itu, para teroris berusaha menggunakan cara bom bunuh diri dalam aksi terornya agar dapat memberikan dampak yang ditimbulkan besar dan menjadi sorotan media dan pemerintah. (Jetter, 2004, h. 30)

2.2.3.2 Pemberitaan Media Tentang Terorisme

Pemberitaan media, memegang peran yang sangat signifikan terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia. Isu terorisme telah menjadi perhatian masyarakat luas, terutama setelah terjadinya peledakan Bom Bali 1 pada 1 Oktober 2002, dan tertangkapnya gembong teroris di Indonesia. Mengenai hal ini, muncul pendapat yang menentang dan bersimpati terhadap aksi teror (Djelantik, 2010, h. 145).

Adanya peristiwa bom Sarinah, menambah deretan aksi teror di Indonesia. Apalagi pada saat kemunculan kejadian ini, sontak pemberitaan media menjadi kacau balau. Kebanyakan media di Jakarta justru membuat pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil, masyarakat menjadi ketakutan melalui penyebaran informasi palsu teror terkait peristiwa bom Sarinah.

Bagi Paletz & Schmid (1992) teroris memegang teguh prinsip dengan melakukan aksi kekerasan dapat memancing perhatian media. Berikut, tiga faktor yang menentukan nilai berita dalam aksi teroris yaitu :

1. Kekerasan dan hal simbolik

Besarnya sebuah kejadian yang memancing media dilihat dari besarnya jumlah korban. Semakin orang menderita, semakin menarik aksi itu bagi jurnalis. Media akan melihat sebuah kejadian itu lebih berharga jika melibatkan hal-hal simbolik contohnya seperti, pemilihan tanggal (hari penting), dan tempat untuk melakukan kekerasan.

Adanya aksi peledakan dan penyerangan di kawasan Sarinah, membuat para media menjadikannya berita utama. Dikarenakan kejadian itu berlangsung di kafe *brand* asing dan berada di pusat kota Jakarta. Menjelang akhir tahun 2015, para aparat keamanan berhasil menggagalkan rencana aksi teror di malam natal dan tahun baru dengan menggunakan istilah 'pengantin' dan 'konser'. Tertundanya aksi teror

di akhir tahun ini membuat para teroris merencanakan kembali 'konser' yang tertunda ini pada 14 Januari 2016.

2. Propaganda

Rekrutmen, penyebaran paham keras melalui media massa dan melakukan aksi teror dapat memancing reaksi media untuk meliput sebuah aksi teroris.

Bila dikaitkan dengan peristiwa bom Sarinah, peneliti melihat dengan adanya aksi pengeboman sebanyak lima kali dan aksi penembakan secara acak membuat tindakan itu menjadi sorotan utama media karena terdapat unsur nilai berita (*importance*).

3. Pemilihan tempat dan waktu

Pemilihan lokasi dan waktu untuk melakukan aksi terorisme juga menjadi salah satu cara untuk memancing perhatian media.

Bila dikaitkan dengan penelitian, factor tersebut telah digunakan oleh para pelaku bom Sarinah. Dimana mereka memilih tempat umum yang berada di pusat kota Jakarta. Apalagi tempat yang terjadi ledakan bom berada di café strabucks, biasanya tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang untuk bertemu rekan kerja, teman ataupun bisnis. Sementara, mereka juga melangsungkan aksi teror tersebut pada jam orang bekerja.

Setelah meliha tiga faktor nilai berita dalam aksi teroris yang sudah di paparkan oleh Paletz & Schmid. Maka dalam meliput terorisme, media massa dihadapkan pada pilihan apakah mempertahankan kepentingan bisnis dan ekonomi atau tanggung jawab sosial (Djelantik, 2010, h. 130)

Media massa memiliki keuntungan dengan adanya berita kekerasan nyata yang sensasional dan spektakuler untuk menaikkan oplah media cetak dan *rating* televisi. Hal ini merupakan dilema, terutama dialami negara-negara penganut paham kebebasan pers yang menjamin kebebasan setiap warga untuk menyiarkan ataupun tidak menyiarkan suatu berita. Karena aksi teror bagaikan teater yang sangat menarik perhatian massa (Djelantik, 2010, h. 130)

Pada saat kejadian aksi teror berlangsung membuat beberapa media justru terjebak dalam mendulang rating dibandingkan mempertimbangkan persoalan etika jurnalistik. Bila dikaitkan dengan penelitian, peran media pada saat kejadian berlangsung membuat masyarakat semakin resah, apalagi banyak *hoax* yang disebarkan melalui media social atau aplikasi pesan singkat seperti Whatsapp, BBM, Line.

Hal ini didukung oleh anggota Dewan Pers, Yoseph Stanley Prasetyo bahwa pemberitaan yang terkait bom Sarinah, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya (*hoax*), akan tetapi media massa tak mampu meredam informasi-informasi yang menyatakan ada teror di lokasi lain di Jakarta. Apalagi pemberitaan tersebut disebarkan sebagian besar media tanpa proses konfirmasi dan verifikasi (Duilah, 2016, para 4&7)

Dua hari setelah peristiwa, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mengeluarkan beberapa teguran kepada sejumlah lembaga penyiaran diantaranya, Metro TV, TVRI, Trans 7, NET TV, I News, Indosiar, TV One dan Radio Elshinta. Media tersebut dituduh tidak melakukan konfirmasi saat tersebar isu teror ke wilayah Palmerah, Cikini, dan sejumlah tempat lainnya. Ditambah lagi, media televisi tidak melakukan sensor terhadap jenazah bom teror. (Duilah, 2016 par. 2&3)

Dalam bukunya yang berjudul *Terrorism and the media*, Paletz dan Schmid (1992, h. 33) mengatakan teroris berusaha untuk menunjukkan kekuatan mereka dengan cara membuat lawannya terlihat lemah. Kesuksesan mereka dalam hal ini tergantung dari publikasi yang mereka dapatkan pada sebuah peristiwa yang mereka buat. Lalu apabila sudah mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat, teroris sudah berhasil menyampaikan pesan-pesannya. Dapat disimpulkan Paletz dan Schmid menilai publisitas/publikasi sebagai elemen terpenting dalam strategi teroris.

Menurut Krueger dan Maleckova (2003) dalam Jetter (2014, h. 2), media menggambarkan terorisme biasanya ditunjukan untuk mempengaruhi penonton dan penekanan yang mengarah ke niat teroris yang menyebabkan ketakutan para khalayak dibandingkan kerugian yang disebabkan kepada korban

Menurut Prajarto (2004, h.43), terlepas dari banyaknya pemerintah negara yang direpotkan oleh ulah teroris, ketakutan di dalam masyarakatlah

yang lebih terasa meskipun hal ini kurang mendapat koverasi yang cukup dari media. Rasa terteror melahirkan kegaman dan keengganan untuk beraktivitas secara biasa.

Menurut Behm tugas pemerintah memfokuskan perhatian pada upaya meniadakan kekerasan serta melindungi kehidupan. Sedangkan media menyusun laporan atas dasar semua fakta secara *cover both side*. Akan lebih ideal lagi bila sembilan elemen jurnalisme dapat dilakukan oleh pekerja media (Prajarto, 2004, h. 49)

Isu tentang simbiosis antara media dan teroris melahirkan sejumlah isu lain dalam kaitannya dengan pertentangan antara keamanan nasional dan kebebasan pers, serta isu tentang masalah obyektivitas, kebenaran dan kebutuhan khalayak dalam pemberitaan media (Prajarto, 2004, h. 40)

Sedangkan, unsur kredibilitas harus menjadi pegangan bagi apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditulis oleh wartawan dalam pembuatan berita. Maka dari itu wartawan dituntut untuk teliti dan akurat (Ishwara, 2011, h. 39)

Dalam prakteknya, media harus melakukan *gatekeeping*. Istilah *gatekeeping* digunakan untuk melabeli kegiatan *screening*, *decision making* dan pemilihan berita. Suatu fakta bisa saja ditampilkan, bisa juga tidak dalam suatu berita. Maka dari itu perlunya *gatekeeping* untuk para wartawan.

Defleur (2002, h. 78) memberikan penjelasan singkat mengenai proses *gatekeeping* :

“Basically it comes down to decision made by editor or others whose responsibility it is to define and design what will be included in today’s newspaper or broadcast”

Proses ini dimulai dengan kegiatan wartawan yang kemudian melaporkan fakta-fakta kepada kantor berita. Lalu, fakta-fakta tersebut disaring untuk diputuskan mana yang dipublikasi dan mana yang tidak. Setiap media memiliki kriteria tertentu untuk menentukan fakta yang dipublikasikan, seperti berdasarkan kebijakan organisasi, pendapat pribadi, kelayakan berita dan konsepsi relevansi dari khalayak (sesuai tidak dengan khalayak berita yang jadi sasaran).

Prajarto menambahkan, secara umum media berita pada idealnya hanya bertindak sebagai ‘*story teller*’ dengan menggunakan 5W+H, penggunaan pertimbangan piramida terbalik, nilai berita dan *lead* yang memenuhi standar profesional jurnalistik (Wahjuwibowo, 2015, h.54).

Setiap jurnalis harus bersikap skeptis. Dikutip dari buku Luwi Ishwara (2011, h. 2) yang berjudul *Jurnalisme Dasar*, Tom Friedman dari New York Time mengatakan, bahwa skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima dan mewaspadaai segala kepastian agar tidak ditipu. Jadi, intinya skeptic adalah keraguan yang membuat orang bertanya, mencari, sampai dapatkan kebenaran, itulah ciri khas dari jurnalisme

Media di negara-negara demokratis berhak mengumumkan segala hal yang menjadi tuntutan dengan dalih menerapkan prinsip kebebasan untuk

menyiarkan (*freedom to inform*), sehingga rakyat berhak untuk mengetahui (*public rights to know*) (Djelantik, 2010, h. 130)

Paham kebebasan pers lebih menguntungkan posisi teroris, terutama dari sisi pemberitaan media yang berlebihan. Karena terorisme adalah sumber berita, maka teroris tidak berkepentingan dengan identitas atau jumlah korban tetapi banyaknya pemirsa yang menonton aksi-aksi mereka (Djelantik, 2010. 130)

Namun kebebasan pers harus dibatasi dengan moral dan etika. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Pada era globalisasi ini media massa harus tetap disertai kewajibannya dengan menyiarkan berita harus bersifat objektif, atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Dari banyak cara dalam menggambarkan peristiwa di dunia. Jurnalisme sering membuat kontroversi. Maksudnya adalah dimana sebuah pemberitaan dapat dijadikan bahan untuk menentukan makna yang terkandung dalam sebuah peristiwa. Sementara jurnalis yang paham pada pembingkaiian sebuah berita dihadapkan pada sumber-sumber yang kredibel agar dapat memaknakan sebuah peristiwa menjadi masuk akal, fokus dan tepat (Norris, 2003, h. 3&4)

Dengan kata lain, kecepatan, percepatan dan cakupan luas tebar informasi tentang terorisme bergantung pada kerja institusi media. Sementara sisi lain, masyarakat bergantung pada media juga, sehingga media massa

menciptakan dua ketergantungan: publisitas bagi teroris dan peliputan untuk masyarakat (Prajarto, 2004, h. 47)

Dalam jurnalnya yang berjudul *Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media*, Nunung Prajarto mengemukakan bahwa ada tuduhan media dan kegiatan terorisme memiliki kepentingan yang sama. Teroris menyusun dan menempatkan strategi media mereka. Sedangkan, media massa menempatkan kepentingannya pada kegiatan para teroris. Seperti pengungkapan Prajarto yang di tertuang mengungkapkan keterkaitan media dan kegiatan terorime (Prajarto, 2004, h 35)

“Pada aktivitas terorisme dan peta posisi peran media bila dimatrikskan akan menuntun pada suatu garis relasi antara terorisme dan media massa. Atas dasar ini, pencermatan terhadap media dalam koverasi mereka terhadap terorisme menjadi lebih mudah dilakukan dan memberi manfaat pada pihak-pihak termasuk pemerintah yang berupaya menentang terorisme”

Bagi Schmid dan de Graff (1982) dalam relasi tersebut, terorisme kemudian tak boleh sekedar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud dari antara propaganda dan kekerasan. Dalam pemberitaan terorisme sendiri memiliki nilai manfaat media massa yang diakui dan diterima. Didukung dengan perkataan Behm (1991), terbuka peluang bagi pemerintah dan media massa untuk bekerja sama menyusun strategi memerangi terorisme (Prajarto, 2004, h. 38)

Hal ini juga didukung beberapa pendapat tentang hubungan terorisme dan media yang dikemukakan dalam dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik yang ditulis Adam W. Sukarno (2011, h. 36) Jeffrey Ian Ross menegaskan :

“Media massa merupakan kampanye yang penting serta menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan perdebatan tentang berbagai hal termasuk terorisme”

Menurut Behm (1991) dikutip dari Jurnal Prajarto, Indonesia dapat mengadopsi strategi yang dipakai pemerintah Australia untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme. Elemen-elemen strategi dalam pendukung tujuan bersama pemerintah dan media yang mengarah pada tersusunnya strategi media pemerintah yaitu :

- a. *Public communication policies and guidelines*
- b. *The incorporation of media response and incident management strategies*
- c. *Media Skills and tehcniques serta physical control*

Pijakan utama dalam penerapan strategi ini adalah legitimasi media untuk mendapatkan dan mewartakan informasi sebanyak mungkin kepada publik dalam suatu kesetimbangan antara kebutuhan publik dan kerahasiaan tertentu yang harus tetap terjaga. Pijakan berikutnya terletak pada upaya agar kelompok teroris dan pendukungnya tidak mendapatkan informasi tertentu dalam kategori rahasia bagi penanganan insiden dan *recovery* keamanan.

Dalam batas tertentu, kredibilitas pemerintah untuk penanganan kasus dan pemulihan keadaan harus diupayakan agar memenangkan dukungan publik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan majalah Tempo, karena majalah Tempo sendiri merupakan media besar di Indonesia yang terkenal kritis, independen, berani dan terpercaya kebenarannya dalam mempunyai pendapat dan sudut pandangnya (Steele, 2005, h 17)

Pemberitaan yang digunakan Tempo pun berbeda dengan pada media lainnya, karena majalah Tempo tidak menulis *hard news* dan piramida terbalik. Justru pengantar tulisannya kadang-kadang yang paling menarik. Majalah Tempo berusaha menulis bagus dengan cara, reportase bagus, tulisan bagus. Dengan dua hal tersebut sebuah berita bisa dianggap ideal baginya

2.2.4 FRAMING

2.2.4.1 Definisi Framing

Pippa Norris mengungkapkan inti dalam sebuah pemberitaan terletak pada ide frame berita (2003, h. 4)

“Decisions and common practices in newsgathering determining what and how stories are covered contribute toward these frames”

Maksudnya dalam keputusan yang diambil dalam sebuah *newsgathering* (pengumpulan data) dapat menentukan bagaimana dan apa sebuah peristiwa dapat dikemas.

Gitlin (1980) mendefinisikan pembingkai sebagai pola yang kuat dari kognisi, interpretasi, dan presentasi dari sebuah pilihan, penekanan, penyingkiran sebuah simbol untuk mengatur wacana. Gamson dan Modigliani (1989) menyebut pembingkai sebagai paket interpretasi yang memberikan makna pada sebuah kejadian (Vreese, 2005, h. 48)

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman (1974) yang dikutip oleh Alex Sobur dalam buku Analisis Teks Media (2006, h. 161) Goffman mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Karena realitas pada dasarnya bukan ditangkap dan tulis, realitas sebaliknya dikonstruksi

Beda halnya dengan Sobur yang dikutip oleh Krisyantono (2006, 253) *framing* adalah membingkai sebuah peristiwa yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dengan adanya cara pandang dan perspektif pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan disajikan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Dalam lingkup internasional, *framing* memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan isu-isu yang bisa disebut sebagai masalah internasional (*agenda setting*), identifikasi dan menjelaskan gangguan atau ancaman keamanan

(*Cognitive Priming*), dan menawarkan beberapa solusi untuk menanganinya (*Evaluation*) (Norris, 2003 , h.11).

Menurut Graber (2001) Ada faktor konseptual pada diri seseorang yang terkadang tidak begitu saja menerima tujuan politis dari sebuah pbingkaian (D'angelo & Kuypers, 2010, h 331)

Esensi *framing* adalah memilih beberapa fakta untuk menjadi prioritas seperti gambar, data atau perkembangan sebuah peristiwa untuk mempromosikan satu interpretasi pada sebuah kejadian (Norris, 2003 , h.11)

Dalam *framing* sebuah berita, media harus melihat dua aspek penting yang menjadi dasar bagaimana sebuah realitas dari peristiwa itu dibangun dan akhirnya ditulis dengan frame yang dianutnya seperti yang dituliskan Eriyanto (2002, h. 69-70), yaitu:

1. Memilih Fakta/Realitas

Fakta dipilih berdasarkan asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa persepektif. Dalam melihat fakta selalu terkandung dua kemungkinan; apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*exclude*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas, bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angle tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang hingga peristiwa itu silihat dari sisi tertentu akibatnya bisa jadi berbeda.

2. Menuliskan Fakta

Berhubung dengan bagaimana fakta dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta yang dipilih ditekankan dengan permainan perangkat tertentu: seperti penempatan mencolok (headline bagian depan atau belakang) pengulangan.

2.2.4.2 Model Framing

Tabel 2.3 Konsep Framing dari beberapa Tokoh

| | |
|---|---|
| David E. Snow dan Robert Benford | Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu. |
| Robert M. Entman | Analisis <i>framing</i> dipakai dalam bagaimana teks komunikasi disajikan, bagaimana representasi yang disampaikan secara menonjol mempengaruhi khalayak. <i>Framing</i> memiliki dua dimensi besar, yaitu seleksi isu yang berkaitan dengan pemilihan fakta dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu yang nantinya dipilih serta ditampilkan oleh wartawan |
| William A. Gamson | Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima |
| Tod Gitlin | Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa |

| | |
|------------------------------------|---|
| | ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas. |
| Amy Binder | Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa |
| Zhondang Pan dan M. Kosicki | Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. |

(Eriyanto, 2002, h. 77-79)

Dalam beberapa model *framing* diatas memiliki kesamaan, yaitu membahas bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkannya kepada khalayak.

Framing Tod Gitlin, Bagaiman frame media tersebut terbentuk. Para wartawan setiap hari membingkai dan membungkus realitas dalam aturan tertentu, kemasan tertentu dan menyederhanakannya serta memilih apa yang tersedia dalam pikiran dan tindakan

Model Pan dan Kosicki, model tersebut tidak merinci secara detail elemen retorik, meskipun dalam tingkatan analisisnya mereka menunjukkan bagaimana kata, kalimat atau gambar dapat dianalisis sebagai bagian integral memahami *frame*, tetapi mereka tidak mengajukan gambaran detail mengenai elemen retorik tersebut.

Model Entman, *framing* sebagai penempatan informasi yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan perhatian lebih. Selain itu *framing* ini dilihat dari bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan oleh pembuat teks.

William Gamson, menggabungkan wacana media dengan pendapat umum. Penyajian suatu isi oleh media menentukan bagaimana khalayak memahami dan mengerti suatu isu

2.2.4.3 Framing Model Robert M. Entman

Menurut Entman, dalam praktik jurnalistik ranah penelitian ini misalnya melihat bagaimana *frame* mempengaruhi kerja wartawan. Apa yang diperhatikan wartawan pertama kali ketika meliput peristiwa, kenapa ia melihat aspek tertentu dan lalu alasan apa yang menyebabkan ia membuat satu informasi lebih penting dan menonjol dibandingkan informasi lain (Eriyanto, 2002, h. 219).

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002, h. 222).

Menurut Carragee & Roefs (2004) *Framing* adalah mekanisme yang digunakan oleh pelaku (aktor) untuk membuat orang lain bersikap seperti yang diinginkan aktor tersebut. Dengan segala *framing* yang dilakukan, masyarakat tidak begitu saja menerimanya. Tidak semua tema atau kejadian mampu

mempengaruhi sikap masyarakat. Ketertarikan masyarakat akan suatu isu (ekonomi, perang, politik, dan lainnya) dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah framing atau tidak (D'Angelo & Kuypers, 2010, h. 332)

Wartawan harus memutuskan apa yang akan ia beritakan. Apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang di tonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak. Menurut Entman, terkadang hal itu membuat berita menjadi bias (kabur). Bias sendiri memiliki tiga konsep diantaranya: (D'Angelo & Kuypers, 2010, h. 335)

- a. *Content bias*: Berita terkadang hanya mementingkan satu sisi saja ketimbang memberikan penanganan yang sama pada dua sisi di sebuah konflik politik.
- b. *Distortion bias*: Terkadang ada berita yang diputar balikkan atau memberikan realitas yang salah
- c. *Decision making bias*: Terkadang pengetahuan dan pikiran jurnalis itu sendiri yang sudah membuat sebuah berita menjadi bias (kabur)

Bagi Grabber (2001) dikutip dalam buku D'Angelo, ada faktor konseptual pada diri seseorang yang terkadang tidak begitu saja menerima tujuan politis dari sebuah pbingkaian (D'Angelo & Kuypers, 2010, h. 333)

Entman menggunakan dua dimensi besar dalam *framing*, yaitu seleksi isu dan penonjolan informasi tertentu. Melalui dua dimensi ini, *framing* mencoba mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan saat menulis berita. Penonjolan informasi adalah proses membuat informasi

menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002, h. 221)

Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang yang diberitakan.

| | |
|------------------|--|
| Seleksi Isu | Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam., aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang di keluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu |
| Penonjolan Aspek | Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak |

Tabel 2.4 Perbedaan Seleksi isu dan Penonjolan Aspek Robert M Entman

Seleksi isu yang akan penulis gunakan dalam penelitian percampuran dari konsep Entman, Vreese, Shoemaker dan Resse. Dikarenakan, penjelasan seleksi isu yang dijelaskan oleh Entman tidak secara detail. Maka dari itu, penulis menggabungkan konsep proses *framing* Vreese pada bagian *framing in the newsroom Internal Media* terdiri dari *editorial policies*, *news values*. Selanjutnya untuk lebih mempermudah lagi dalam menganalisis, penulis turut

menggunakan konsep hierarki pengaruh media Shoemaker dan Resse yang terbagi menjadi tiga level dalam pengaruh internal media yakni, *Individual level, media routine level dan oragnizational level.*

Dalam konsepsi Entman dalam buku Eriyanto, *Framing* dasarnya merujuk pada empat elemen dalam suatu wacan untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan merujuk kepada empat elemen diantaranya (2002, h. 223) :

a. *Define Problem* (Pendefinisian Masalah)

Menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan ketika ada masalah atau peristiwa. Dalam hal ini, peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda, maka dari itu bisa membuat realitas bentukan yang berbeda. Elemen ini merupakan bingkai paling utama.

b. *Diagnose Problem* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Pada elemen kedua ini untuk membingkai siapa yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Penyebabnya bisa berupa 'What' tetapi juga bisa 'Who'

c. *Make Moral Judgement* (Membuat pilihan Moral)

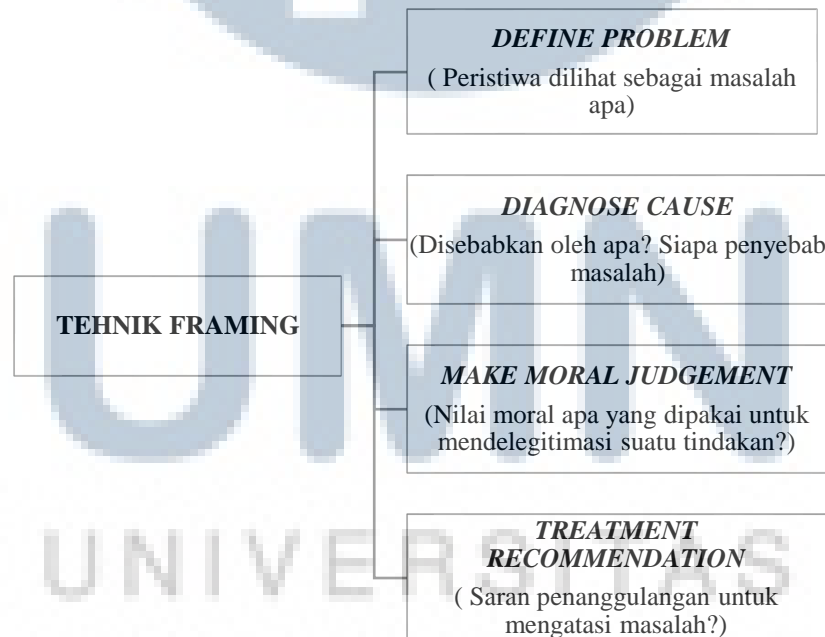
Elemen ketiga ini digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada definisian masalah yang dibuat. Ketika masalah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan serta juga dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan.

d. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

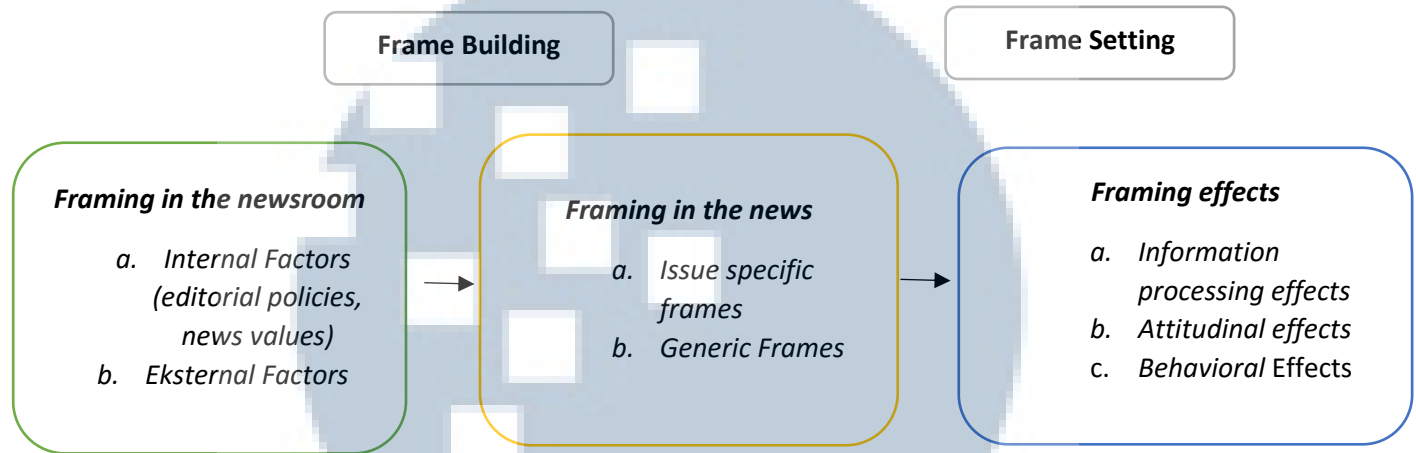
Elemen terakhir ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Dimana para wartawan memilih jalan apa dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam elemen ini penyelesaian sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab

Tabel 2.5 Model Framing Robert Entman

Sumber : Eriyanto 2002 h. 295



2.2.4.4 Proses Framing



Tabel. 2.6 Proses Framing Menurut Vreese

Dikutip dari jurnal *News framing: Theory and typology*, Shoemaker & Resse (1996) menjelaskan proses *framing*. Dalam proses *framing* terbagi ada dua tipe yaitu *frame building* dan *frame setting*. *Frame building* adalah faktor yang mempengaruhi kualitas struktur dari pembedaan berita. *Frame setting* adalah interaksi antara pembedaan media dan individual melalui pengetahuan. Pembedaan dalam berita dapat berdampak pada proses belajar, pemaknaan, dan evaluasi seseorang dari sebuah kejadian (Vreese, 2005, h. 51-55)

Framing in the newsroom, teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Shoemaker dan Resse membagi kepada beberapa level pengaruh isi media. Yaitu terdiri dari bagian Internal, Faktor internal melingkup dari segi jurnalisme. Dimana para redaksi yang mengatur kebijakan, seberapa penting

nilai suatu berita itu disaat melakukan pemingkaian sebuah berita. Faktor Eksternal, melingkupi bagaimana hubungan jurnalis dan elite (pemerintah), petinggi setempat ataupun masyarakat.

Framing in the news, Menurut Semetko dan Valkenburg (2000) dalam de Vreese (2005, h. 56) dalam penelitian tentang frame berita dengan mengidentifikasi lima frame berita karena memiliki kemampuan mempengaruhi arah pikiran khalayak, yaitu:

1. Konflik. Konflik yang dibingkai dalam berita memberikan penekanan konflik antara individu, kelompok, lembaga, atau negara.
2. Human Interest, yakni frame berita yang membawa cerita tentang manusia, individu, atau mengambil sudut pandang emosional.
3. Atribusi tanggung jawab, yakni frame berita yang menyajikan suatu permasalahan namun harus menyertakan unsur pemecahan kasus baik itu dari pemerintah, kelompok, atau individu.
4. Moralitas, yakni frame berita yang menafsirkan suatu peristiwa atau isu berdasarkan konteks nilai-nilai moral maupun ajaran agama.
5. Konsekuensi ekonomi yakni frame berita yang menyajikan suatu peristiwa, masalah, atau isu dalam hal ekonomi yang akan terjadi pada seorang individu, kelompok, lembaga, atau negara

Frame berita membawa nilai yang melekat di masyarakat, menekankan pada

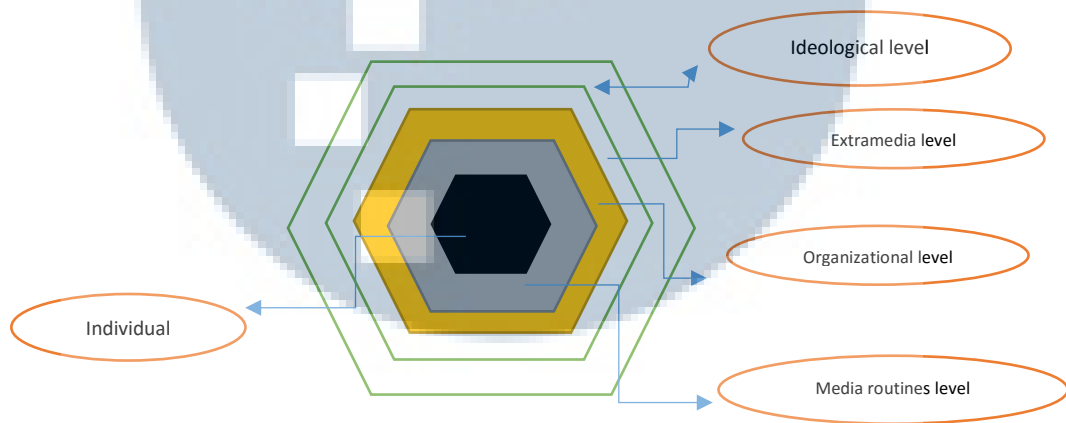
aspek positif dan negatif dari sebuah isu, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi publik dalam mendukung sebuah kebijakan. Dalam frame berita juga terdapat *issue specific frames* dan *generic frames*. Vreese mengemukakan bahwa tipologi ini dibuat lebih umum karena mengacu pada sifat dan isi frame

Namun, disisi lain, generic frame berada pada penggambaran isu secara umum, melampaui keterbatasan tematik dari berita tersebut sehingga dapat diidentifikasi kaitannya dengan topik yang berbeda, bahkan dapat menjangkau waktu dan budaya yang berbeda.

Framing Effect, terdiri dari bagian *Information Processing effects*, hal ini merupakan dampak khalayak saat menerima suatu informasi. *Attitudinal effects*, hal yang melingkupi sikap khalayak saat menerima informasi. Dan *Behavioral effects*, merupakan bagian perubahan dan perilaku khalayak setelah menerima informasi.

Untuk sebagai bahan pelengkap dan memudahkan penulis dalam melakukan analisis, dari penjelasan konsep Vreese *framing in the news room*, penulis menggunakan konsep pengaruh media yang diungkapkan oleh Shoemaker dan Resse dimana pada konsep, penulis menjadi mudah dalam melakukan seleksi isu dengan berlandaskan framing Entman. pada bagian Dikutip dari buku Shoemaker dan Resse (1996, h. 63-102) yang berjudul *Mediating The Message: Theories on Mass Media Content*, teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Shoemaker dan Resse membagi kepada

beberapa level pengaruh isi media. faktor internal yang melingkup dari jurnalisme dalam melakukan pembuatan sebuah berita. Terdiri menjadi tiga bagian diantaranya : *Organizational level*, *media routines level*, dan *individual level*. Sedangkan pengaruh dari luar media (*outside media level*), dan yang terakhir adalah pengaruh ideologi (*ideology level*).



Gambar 2.1 Kerangka Hierarki Pengaruh Media Shoemaker dan Resse

Pada bagian proses hierarki pengaruh media, Shoemaker dan Resse (1996, h. 60) mengatakan bahwa teori ini untuk mengetahui bagaimana pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sementara, faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah, masyarakat dan faktor eksternal lainnya.

Pada teori ini, penulis akan melihat seberapa kuat pengaruh pada majalah Tempo yang terjadi hanya pada level internal saja terkait dalam pembuatan berita bom Sarinah 14 Januari 2016. Untuk lebih detailnya, penulis akan menjelaskan teori hierarki pengaruh media diantaranya:

a. Level Pengaruh Individu Pekerja Media (*Individual level*)

Pembentukan konten suatu media dan pembuatan berita tidak terlepas dari faktor individu atau jurnalis. Arah pemberitaan dan unsur-unsur yang diberitakan tidak dapat dilepaskan dari seorang jurnalis. Level individu ini adalah tahap awal dari proses pembuatan berita. Menurut Shoemaker dan Reese (1996, h. 63-102) menyebut seorang jurnalis sebisa mungkin berusaha untuk objektif saat memandang sebuah peristiwa. Bagaimana sebuah berita dan pilihan kata diambil oleh seorang jurnalis biasanya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu masalah gender atau jenis kelamin dari jurnalis, etnis, orientasi seksual, faktor pendidikan dari sang jurnalis dan dari golongan manakah jurnalis tersebut, orang kebanyakan atau golongan elit. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi berita yang bentuk oleh jurnalis sebagai sosok individu yang melihat dan merekonstruksikan berita.

Jurnalisme kerap dipandang sebagai profesi yang mudah. Orang berpikir tidak perlu gelar sarjana untuk menjadi jurnalis. Mereka berpikir dapat menulis. Tapi hasilnya orang-orang banyak mencoba dan akhirnya pindah pekerjaan. Gaji kecil, dan minim keuntungan adalah alasan mereka meninggalkan jurnalisme (Shoemaker&Resse, 1996, h. 74).

Hal tersebut berhubungan dengan faktor pendidikan si jurnalis. Banyak terjadi perdebatan, apakah jurnalis yang mendapatkan pendidikan dalam bidang ilmu komunikasi jurnalistik lebih piawai ketimbang ilmu lainnya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan antara seorang pekerja media yang mendapatkan Ilmu jurnalistik atau melalui disiplin lainnya yaitu seorang jurnalis yang mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan melalui ilmu jurnalistik memiliki kelebihan dalam teknik penulisan. Sedangkan yang kelebihan seorang jurnalis dari disiplin ilmu lainnya adalah mereka lebih fokus terhadap bidang ilmu yang digelutinya.

Selain itu ada faktor lain seperti sikap, kepercayaan, dan nilai yang diyakini individu/jurnalis. Faktor-faktor ini mempengaruhi sebuah pemberitaan yang dibentuk oleh jurnalis, karena segala pengalaman dan nilai-nilai yang didapatkan secara tidak langsung dapat berefek pada pemberitaan yang dikonstruksi oleh jurnalis. Namun Shoemaker memandang sikap, nilai, dan kepercayaan individu tidak memberikan dampak besar bagi konten sebuah berita. Dikarenakan kekuatan aspek organisasi dan rutinitas media yang lebih kuat (Shoemaker dan Resse, 1996, h, 91).

b. Level Rutinitas Media (Media routines level)

Media routines adalah suatu rutinitas dari media itu sendiri. Pada level ini mempelajari tentang efek pada pemberitaan dilihat dari sisi rutinitas media. Rutinitas media adalah kebiasaan sebuah media dalam pengemasan dan sebuah berita. Media rutin terbentuk oleh tiga unsur yang saling berkaitan yaitu sumber

berita (*suppliers*), organisasi media (*processor*), *audiens* (*consumers*). Ketiga unsur ini saling berhubungan dan berkaitan dan pada akhirnya membentuk rutinitas media yang membentuk pemberitaan pada sebuah media (Shoemaker dan Resse, 1996, h. 109).

Penulis akan menjabarkan penjelasan dari ketiga unsur yang membentuk rutinitas media yang membentuk pemberitaan pada majalah Tempo, yaitu: (Shoemaker, 1996, h. 105-136)

- a) Sumber berita (*suppliers*) merupakan sumber berita yang didapatkan oleh media untuk sebuah pemberitaan. Sumber berita adalah dimana berita didapatkan oleh pencari berita. Sumber berita biasanya adalah lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya, masyarakat, partai politik, pakar, prees dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini dapat mempengaruhi pemberitaan sebuah media dikarenakan, kadang lembaga-lembaga ini memberikan pesanan agar berita yang keluar dari sebuah media tidak bertentangan dengan lembaganya.

Walaupun sumber berita tidak terlalu berdampak signifikan pada konten dari sebuah media, tetapi ketergantungan sebuah media dengan sebuah berita sedikit banyak dapat mempengaruhi sebuah pemberitaan. Biasanya terjadi simbiosis mutualisme antara sumber berita dengan media yang mencari berita.

Bagi Shoemaker dan Resse (1996, h. 137) rutinitas sebuah media memiliki pengaruh yang penting pada produksi isi simbolik. Mereka membentuk lingkungan dimana pekerja media melaksanakan pekerjaannya. Pengaruh rutinitas ini berpengaruh secara alamiah karena bersifat keseharian dan terkesan tidak memaksa pekerja media.

b) Organisasi media (*processor*) adalah bisa dikatakan redaksi sebuah media yang mengemas pemberitaan dan selanjutnya dikirim kepada *audience (consumer)*. Unsur yang paling berpengaruh pada organisasi media adalah editor media atau yang biasa disebut sebagai *gatekeeper*. Editor pada setiap media adalah yang menentukan mana berita layak untuk diterbitkan atau tidak. Hasil pencarian berita oleh wartawan diputuskan oleh editor di meja redaksi. Jadi editor yang menentukan mana berita yang layak terbit. Kebijakan dari editor yang menentukan rutinitas sebuah media dalam menentukan pemberitaan.

Jenis media pun mempengaruhi rutinitas sebuah media yang pada akhirnya berpengaruh pada isi dari media.

Contohnya, perbedaan antara media cetak dengan media penyiaran seperti televisi dan media online. Para pencari berita media cetak lebih bebas dalam memberikan warna pada

pemberitaannya. Ini dikarenakan media cetak terbit sekali sehari dan tidak ada tuntutan untuk memberitakan berita secara langsung dan cepat.

c) *Audience (consumer)* adalah konsumen sebuah berita di media, bisa terdiri dari pendengar, pembaca atau penonton. Pada unsur ini turut berpengaruh pada level media rutin. Dikarenakan pemilihan sebuah berita yang akan ditampilkan sebuah media yang pada gilirannya akan disampaikan pada audiens. Ketergantungan media terhadap *audience* yang akan menghasilkan keuntungan bagi media, turut menjadi penyebab kenapa media sangat memperhatikan unsur *audience* dalam pemilihan berita.

Dalam buku Shomaker dan Resse (1996, h. 111) media harus memikirkan apa yang dibutuhkan orang-orang. Informasi apa yang layak diberikan pada orang-orang. Maka dari itu ada yang disebut nilai berita. Ada enam nilai berita yang jadi

pertimbangan media dalam merilis pesan diantaranya:

1. Faktor pentingnya sebuah pemberitaan (*importance*)
2. Faktor kemanusiaan (*Human Interest*)
3. Faktor konflik atau kontroversi pada sebuah pemberitaan (*conflict/controversy*)

4. Faktor ketidakbiasaan sebuah berita yang diberitakan (*The unusual*)
5. Faktor keaktualan sebuah berita (*timelines*)
6. Faktor kedekatan sebuah pemberitaan dengan *audience* (*proximity*)

c. Level Pengaruh Organisasi (*Organizational Level*)

Pada level ini kita akan membahas pengaruh organisasi pada sebuah media kepada sebuah pemberitaan. Level organisasi ini berkaitan dengan struktur manajemen organisasi pada sebuah media, kebijakan sebuah media dan tujuan sebuah media. Bila berkaitan dengan level sebelumnya pada teori hierarki pengaruh yaitu level individu dan media rutin, level organisasi lebih berpengaruh dibanding kedua level sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebijakan terbesar dipegang oleh pemilik media melalui editor pada sebuah media. Jadi penentu kebijakan pada sebuah media dalam menentukan sebuah pemberitaan tetap dipegang oleh pemilik media. Ketika tekanan datang untuk mendorong, pekerja secara individu dan rutinitas mereka harus tunduk pada organisasi yang lebih besar dan tujuannya (Shoemaker dan Resse, 1996, h. 140)

Dalam organisasi media ada tiga tingkatan umum. Lini depan karyawan, seperti penulis, wartawan dan staf kreatif, mengumpulkan dan mengemas bahan baku. Tingkat menengah terdiri dari manajer, editor, produser dan orang lain yang mengkoordinasi proses dan memediasi komunikasi antara level bawah

dan level atas yang mengeluarkan kebijakan organisasi. Eksekutif tingkat atas perusahaan dan berita membuat kebijakan organisasi, anggaran yang ditetapkan, membuat keputusan penting, melindungi kepentingan komersial dan politik perusahaan dan bila perlu mempertahankan karyawan organisasi dari tekanan luar (Shoemaker dan Resse 1996, h. 151)

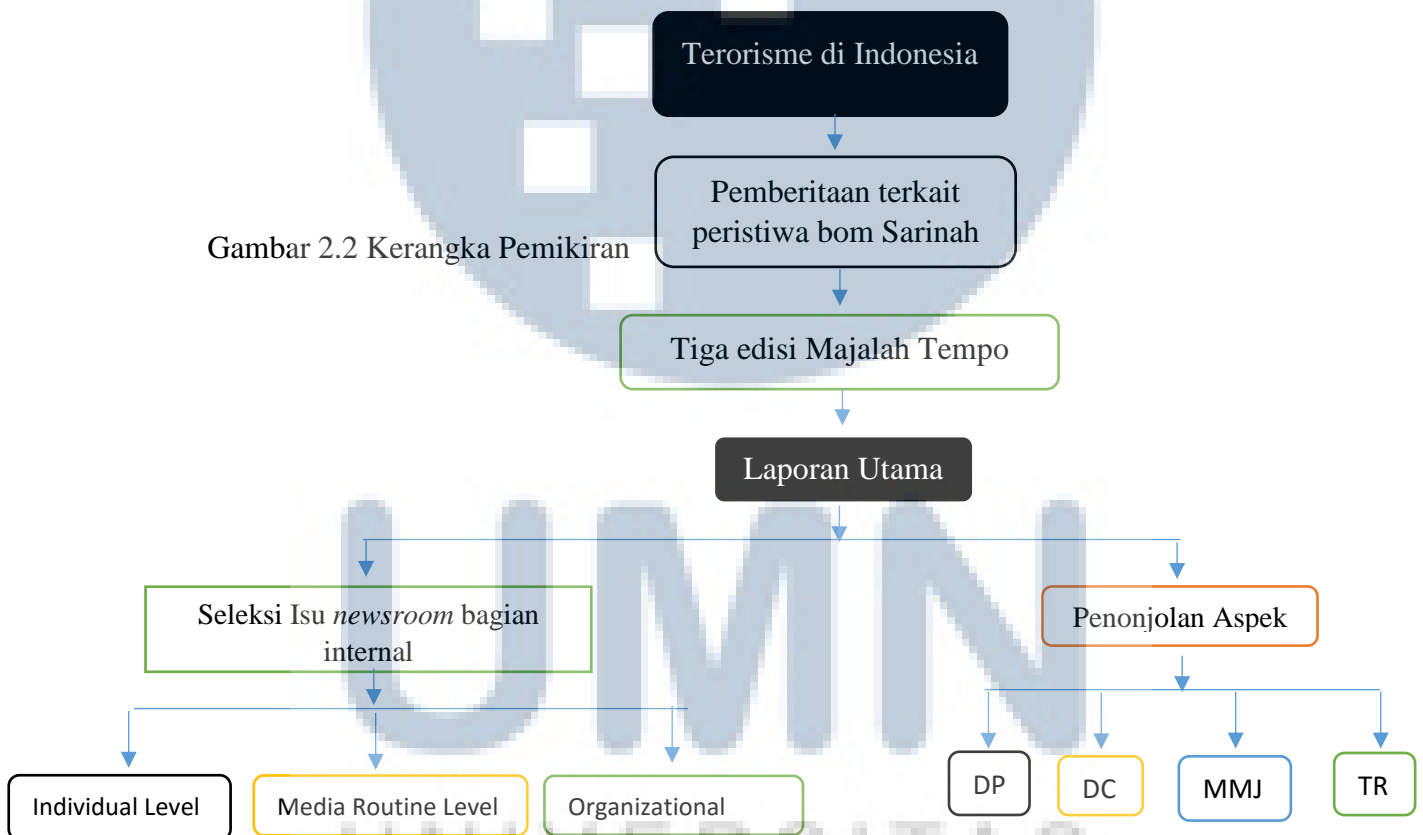
Bagi Shoemaker dan Resse (1996, h. 161) jika dilihat dari model struktur yang disebutkan di atas terjadi jarak antara para jurnalis atau pencari berita dengan para pemimpin di sebuah media. Posisi editor yang berada di tengah-tengah antara pemimpin media dengan para jurnalisnya, membuat posisinya terbagi dua. Di satu sisi editor sebagai pengelola berita tapi di satu sisi editor dituntut untuk mengemas pemberitaan yang menjual yang akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi sebuah media. Editor harus memahami dimana anggaran mereka cocok dengan gambaran keuangan yang lebih besar dari perusahaan mereka dan dimana prioritas berita sesuai rencana strategis secara keseluruhan. Para pemimpin media adalah orang yang berada pada posisi paling puncak dalam pengambilan keputusan, jika karyawan tidak suka, mereka dapat meninggalkan perusahaan (Shoemaker, 1996, h. 163).

Titik fokus level ini adalah pada pemilik atau pemimpin media yang menentukan kebijakan sebuah media. Level ini memperhatikan beberapa aspek yaitu apa saja peran organisasi media itu, bagaimana strukturnya, apa kebijakan dan bagaimana penerapan di dalam media itu, serta apa kepentingan dan tujuan

dari media tersebut (ekonomi, politik, dan lain-lain) (Shoemaker dan Resse, 1996, h. 172)

2.2.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



DP : *Define Problem*

DC : *Diagnose Causes*

MMJ : *Make Moral Judgement*

TR : *Treat Problem*

Kerangka pemikiran diatas merupakan peta dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana Majalah Tempo membingkai berita laporan utama terkait peristiwa bom Sarinah, penulis menggunakan model analisis *framing* Robert M. Entman. Karena penulis ingin menganalisis bagaimana Majalah Tempo menyeleksi fakta dan pendapat narasumber serta menonjolkan aspek-aspek tertentu.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penyeleksian isu terkait Bom Sarinah dalam majalah Tempo pada bagian internal yaitu *individual level*, *media routine*, *organizational level*. Dalam hal ini penulis hanya melakukan seleksi isu bagian *newsroom* di tahap internalnya saja. Sementara dalam dimensi penonjolan aspek ingin mengetahui bagaimana Majalah Tempo memberitakan terorisme Indonesia yang terkait bom Sarinah (*define problem*), Siapa yang melatarbelakangi peristiwa bom Sarinah (*diagnoses causes*), Nilai moral yang digunakan Majalah Tempo dalam melegitimasi suatu tindakan (*make moral judgement*). Kemudian mengetahui bagaimana Majalah Tempo menekankan penyelesaian peristiwa bom Sarinah.

